

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian maka dapat disimpulkan:

1. Stakeholder yang terlibat dalam Tata Kelola Pengelolaan Sampah di TPA Jatibarang, meliputi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan, PT. PLN, T. PII, PT. Bhumi Pandanaran Sejahtera, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, DPMPTSP Kota Semarang, Pemerintah Denmark, Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, dan Masyarakat Kota Semarang.
2. Pemerintah selaku stakeholder internal masih terlalu fokus pada inovasi teknologi penanganan sampah di hilir, sedangkan sinergitas stakeholder di hulu belum terjadi secara optimal sehingga permasalahan sampah yang bermuara di hilir belum menemukan solusi yang paling tepat. Sinergitas antara Dinas Lingkungan Hidup, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat masih belum terjadi secara optimal sehingga belum memberi pengaruh yang signifikan terhadap pengurangan volume sampah di hulu.

Skema PPP yang dijalankan Pemkot Semarang dengan PT. Narpati tidak berjalan sesuai dengan perjanjian dan telah berhenti pada tahun 2018. Skema kerjasama lain yang dilakukan Pemkot Semarang yaitu skema KPBU instalator PSEL dengan PT. PLN dan dioperatori oleh PT. Bhumi Pandanaran Sejahtera yang ditunjuk langsung oleh Wali Kota selaku PJKP.

3. Faktor Penghambat Tata Kelola Pengelolaan Sampah TPA Jatibarang:
 - a. Efektifitas dan efisiensi, menerapkan sistem *Waste to Energy* atau pengolahan sampah menjadi energi seharusnya bukan urgensi yang menjadi fokus utama Pemerintah Kota Semarang. Hal ini dikarenakan sistem *Waste to Energy* bukan menyelesaikan masalah sejak di hulu namun hanya menangani sampah di hilir dengan resiko sebagai berikut:
 - Biaya modal dan biaya operasional yang tidak murah;
 - Jumlah energi yang dihasilkan tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan jangka panjang; dan
 - Terjadi gagal operasi karena masalah teknis dan finansial.
 - b. Partisipasi Masyarakat, masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemilahan dan pendaur ulangan sampah. Pengurangan sampah di hulu akan membantu untuk mengurangi volume sampah yang terangkut ke TPA. Kesadaran masyarakat untuk mengurangi sampah *non-recycle* dikarenakan kurangnya pendekatan yang konsisten di lingkup Rumah Tangga.

5.2. SARAN

Beberapa upaya yang realistis untuk segera dilakukan dalam mempercepat pencapaian pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan mencegah adanya sampah di daratan dan lautan, diantaranya:

1. Pemerintah perlu lebih meletakkan fokus untuk mengatasi masalah sampah dengan mengutamakan program pengurangan timbulan sampah, meningkatkan pemilahan dan pengolahan sampah mulai dari tiap kecamatan atau TPS hingga ke TPA Jatibarang. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam Tata Kelola Pengelolaan Sampah di TPA Jatibarang, sehingga perlu mengembangkan program edukasi masyarakat untuk mengurangi timbulan sampah dan melakukan pemilahan sampah sejak dari sumbernya.
2. Melakukan perbaikan sistem pada tahap penanganan dengan mewujudkan pengumpulan sampah secara terpilah serta pengolahan sampah organik sedekat mungkin dengan sumber. Cara tersebut akan mendorong terjadinya daur ulang yang berpotensi mencapai pengurangan sampah sebesar 60% hingga 90%. Hal ini terbukti lebih realistis untuk diterapkan di negara-negara berkembang seperti yang diimplementasikan di beberapa kota di negara bagian Kerala (India). Sistem pengumpulan sampah secara terpilah yang dipadukan dengan penerapan pengomposan di rumah sebagai bentuk pengolahan sampah organik secara terdesentralisasi dan menyeluruh, sehingga mengurangi volume sampah yang diangkut ke TPA Jatibarang.

3. Melakukan pendekatan pengurangan volume sampah mulai dari lingkup Rumah Tangga. Pendekatan ini dapat dimulai dengan peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya sampah *non recycle* atau yang tidak dapat di daur ulang. Memperkenalkan kepada masyarakat tentang alternatif pengganti kantong plastik seperti kantong kertas atau tas kain. Pendekatan ini dapat diimplementasikan dengan mengoptimalkan peran Perguruan Tinggi dalam melaksanakan pengabdian masyarakat.